

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
2021**

## KATA PENGANTAR

Kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat selesai pada waktunya. Sekretariat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan seluruh OPD, dimana Sekretariat Daerah berperan dalam advokasi, koordinasi dan sinkronisasi melalui bagian-bagian yang dikoordinasikan oleh Asisten dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Peran Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai upaya membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat. Upaya yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Kabupaten Lampung Barat lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis.

Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah. Oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terimakasih.

Liwa, Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH

**Akmal Abd. Nasir. S.H**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630405 199303 1 011

## DAFTAR ISI

---

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan. Sebelum diimplementasikan kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagudana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4(empat) tahapan yakni :

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Lampung Barat untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Lampung Barat adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Lampung Barat di butuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian di harapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lampung Barat akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat.

Adapun Visi Kabupaten Lampung Barat adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”**

Misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat ada 4 (empat) yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
4. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD tahun 2017-2022, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat misi yang terkait adalah :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
4. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2022 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;

- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2005–2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
- j. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk membangun sebuah rencana kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan sistem manajemen perencanaan yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah :

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar SKPD, Stakeholders, masyarakat.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Sekretariat Daerah baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

#### **1.4.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

---

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 merupakan periode kelima dari Renstra Sekretariat 2017-2022. Kegiatan Sekretariat yang dilakukan pada tahun 2021 melalui proses perencanaan yang dituangkan dalam rencana kerja. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan atas dasar pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme keterkaitan antar sektor.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah refocusing sebanyak 16 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah refocusing sebanyak 116 kegiatan . Alokasi dana tahun 2020 untuk Belanja langsung setelah refocusing sebesar Rp. 22.442.934.100,- terealisasi sebesar Rp. 20.991.043.771,- atau 94 persen .

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 42 kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik realisasi \*fisik / output sebesar 59,12 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik belum terealisasikan atau tidak sesuai target capaian pada Rencana Aksi TW.IV dikarenakan menyesuaikan pembayaran rekening listrik/telpon/air sesuai invoice tagihan per bulan sehingga penyerapan anggaran tidak melebihi pagu.
2. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi fisik / output sebesar 40,29 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan belum terealisasikan tidak sesuai target capaian pada Rencana Aksi TW.IV dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan Buku Cek .
3. Kegiatan Penyediaan Biaya Sewa Gedung/Rumah/Penginapan realisasi \*fisik / output sebesar 41,34 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan terjadi refocusing anggaran TA. 2020 yang menyebabkan adanya



beberapa target yang tidak terlaksana seperti pada TW.IV pelaksanaan kegiatan yang memerlukan Sewa Gedung/Rumah/Penginapan tidak terealisasi akibat pembatasan sosial akibat Pandemi Covid-19.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan realisasi \*fisik / output sebesar 76,82 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.IV Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tidak sesuai dengan Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW IV.
5. Kegiatan Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer realisasi fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Pengadaan Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat covid-19 sehingga kegiatan Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer di tiadakan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Tidak ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat covid-19 sehingga kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di tiadakan.
7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor realisasi \*fisik / output sebesar 71 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, belum terealisasikan sesuai Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IV dikarenakan revocusing anggaran TA 2020 untuk mengatasi covid-19 menyebabkan adanya target yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya.
8. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional realisasi \*fisik / output sebesar 14 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, terealisasikan 1 unit Kendaraan Dinas, untuk kendaraan pelayanan sedang ditunda sesuai surat dari polres lampung barat tentang usulan pergeseran anggaran.atau revocusing dan pembahasan anggaran TAPD meyebabkan beberapa target tidak tercapai.
9. Kegiatan Sewa Kendaraan Dinas/Operasional realisasi \*fisik / output sebesar 27,27 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Sewa Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi sebanyak 9 unit sehingga tidak mencapai Target Capaian Kinerja Rencana Kasi TW.IV dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas realisasi \*fisik / output sebesar 67 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas, tidak terealisasikan sesuai Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IV dikarenakan Revocusing anggaran TA 2020 untuk mengatasi covid-19 menyebabkan adanya target yang tidak dapat terlaksana maksimal.

11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleurrealisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur, belum terealisasikan sesuai Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.II dikarenakan Adanya refocusing anggaran untuk penanganan wabah Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan ditiadakan
12. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinasrealisasi \*fisik / output sebesar 25 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas tidak terealisasi dikarenakan untuk tahun 2020 hanya dianggarkan untuk pengadaan Sofa sebanyak 2 set karena revocusing dan pembahasan anggaran TAPD menyebabkan beberapa target tidak tercapai.
13. Kegiatan Pengadaan Mebeleur realisasi fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Tidak ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.II Kegiatan Pengadaan Mebeleur, dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan wabah Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan ditiadakan.
14. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Tidak ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.II Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dikarenakan Adanya refocusing anggaran karena wabah covid-19 sehingga pendidikan dan pelatihan ditiadakan untuk tahun 2020
15. Kegiatan Bimtek Keprotokolan realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Tidak ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.II Kegiatan Bimtek Keprotokolan dikarenakan Adanya refocusing anggaran karena wabah covid-19 sehingga Bimtek Keprotokolan ditiadakan untuk tahun 2020
16. Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa realisasi \*fisik / output sebesar 44 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Realisasi Target Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebesar 155 Paket, belum tercapai sesuai target capaian kinerja Rencana Aksi TW.IV dikarenakan fasilitasi pengadaan dilakukan melalui reuiu persiapan pengadaan terhadap rencana pemilihan penyedia (tender/seleksi/penunjukan langsung) yang diajukan oleh OPD terhadap seluruh paket tender/seleksi di Kab. Lampung Barat
17. Kegiatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah realisasi \*fisik / output sebesar 44 persen . Realisasi fisi /output tidak

mencapai 100 persen dikarenakan Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.IV Kegiatan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak terealisasi sesuai Rencana Aksi dikarenakan pengadaan dilakukan melalui revidi persiapan pengadaan terhadap rencana pemilihan penyedia (tender/seleksi/penunjukan langsung) yang diajukan oleh OPD terhadap seluruh paket tender/seleksi di Kab. Lampung Barat

18. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Tidak ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.IV dikarenakan Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa ditiadakan dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat Pandemi covid-19
19. Kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Resiko, Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Tidak ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.IV sebagaimana pada Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IV dikarenakan Kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Resiko, Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang / Jasa ditiadakan dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat Pandemi covid-19 sehingga kegiatan ditiadakan.
20. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa Secara Swakelola realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Belum ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.IV dikarenakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa Secara Swakelola ditiadakan dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat Pandemi covid-19.
21. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (APKASI) realisasi \*fisik / output sebesar 17 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IV Indikator Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (APKASI), sampai dengan TW.IV baru terealisasi 1 kali dikarenakan belum adanya Undangan Rapat Koordinasi Apkasi serta target yang direncanakan pada perjanjian kinerja, hal ini dikarenakan pengalihan anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19
22. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Target kinerja Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri pada TW.II tidak dapat terlaksana sesuai dengan target yang ada di Rencana Aksi dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19

23. Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah realisasi \*fisik / output sebesar 85 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Capaian Realisasi target kinerja Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah 85 kali, capaian tidak sesuai dengan target capaian kinerja rencana aksi TW IV dikarenakan menyesuaikan dengan Agenda kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati yang ada.
24. Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-undanganrealisasi \*fisik / output sebesar 70 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Realisasi Target capaian Kinerja Rencana Aksi pada TW.IV terealisasikan sebanyak 7 Perda.dan Ranperda 7 sudah dilakukan persetujuan antar bupati dan DPRD dan saat ini masih dalam tahap fasilitasi Gubernur
25. Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah belum di realisasikan sesuai dengan Target kegiatan sudah mulai dilaksanakan akan tetapi anggaran dialihkan pada penanganan covid-19
26. Kegiatan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Aparaturrealisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.IV Kegiatan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Aparatur belum di realisasikan sesuai dengan Target Capaian Kinerja pada Rencana Aksi TW.IV dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga target kinerja yang direncanakan tidak dapat terealisasi.
27. Kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisi /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Target Kinerja Rencana Aksi TW.II Kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak terealisasikan sesuai Target yang di rencanakan pada Rencana Aksi dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. sehingga target kinerja yang direncanakan tidak dapat terealisasi.
28. Kegiatan Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Belum ada realisasi Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IVdikarenakan belum adanya fasilitasi dari provinsi selaku fasilitator berdasarkan permendagri no 141 tahun 2017 pasal 19 ayat 2
29. Kegiatan Penyelesaian Status Pekon Sukapura dan Tribudi syukur realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Belum ada realisasi Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW IV dikarenakan fasilitasi/koordinasi ke KLHK dan Kemendagri belum bisa dilaksanakan karena bencana nasioanl (covid-19)

30. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Lampung Barat realisasi \*fisik / output sebesar 75 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Lampung Barat terealisasi sebanyak 9 kegiatan sedangkan 3 kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar ditiadakan dikarenakan adanya kebijakan Social Distancing akibat Pandemi Covid-19.
31. Kegiatan Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adharealisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Belum ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi pada TW.II Kegiatan Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha dikarenakan ada nya kebijakan social distancing akibat Pandemi covid-19 sehingga terjadi refocusing anggaran.
32. Kegiatan Penyebaran Syiar Agama realisasi \*fisik / output sebesar 66,67 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IV Kegiatan Penyebaran Syiar Agama Indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan yasinan malam Jumat sebanyak 5 kali tidak terealisasi dikarenakan kegiatan yasinan tidak bisa dilaksanakan karena adanya Social Distancing terkait pandemi COVID-19.
33. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Haji/Umroh Wisata Rohanirealisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Belum ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi pada TW.IV Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Haji / Umroh Wisata Rohani belum terealisasi sesuai target capaian kinerja Rencana Aksi TW.IV dikarenakan adanya pengalihan anggaran kegiatan untuk penanganan covid 19.
34. Kegiatan Pembinaan Bidang Bina Sosial dan Kesehatan realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Belum ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi pada TW.IV Kegiatan Pembinaan Bidang Bina Sosial dan Kesehatan sebagaimana memang tidak ada Target Capaian Indikator Kinerja pada Rencana Aksi TW.IV.karena mengikut anjuran Pemerintah Pusat melalui surat edaran bahwa lomba sekolah sehat ditiadakan untuk menghindari penyebaran wabah covid-19
35. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga realisasi \*fisik / output sebesar 50 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Belum ada Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi pada TW.IV Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga terealisasi 1 kali pelaksanaan rakor dikarenakan ada nya pengalihan anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19
36. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perjanjian RPP dan RKT (Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis). realisasi \*fisik / output sebesar 35 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Capaian Realisasi Target Kinerja

Rencana Aksi TW IV Kegiatan Penyusunan Dokumen Perjanjian RPP dan RKT Tahun 2020 Triwulan IV adalah sebesar 1 dokumen dari target sebesar 4 dokumen yang direncanakan dikarenakan kegiatan ini sebagian anggarannya telah dilakukan refocusing anggaran terkait pandemi covid-19.

37. Kegiatan Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. Lampung Barat realisasi \*fisik / output sebesar 3 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Realisasi Target Kinerja Rencana Aksi TW.IV tidak tercapai sesuai target yang direncanakan terkait dengan hasil refocusing anggaran. Karena dana cetak buku direfocusing maka untuk jumlah buku akan di buat laporan.
38. Kegiatan Pelaksanaan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) realisasi \*fisik / output sebesar 10 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Kegiatan belum memenuhi target yang telah direncanakan pada TW.IV dikarenakan tidak tercapai sesuai target yang direncanakan terkait dengan refocusing anggaran, karena dana cetak buku direfocusing maka untuk jumlah buku akan di buat laporan
39. Kegiatan Rekrutmen Perangkat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) realisasi \*fisik / output sebesar 0 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Kegiatan belum memenuhi target yang telah direncanakan Pada Rencana Aksi TW.IV dikarenakan kegiatan rekrutmen tersebut direncanakan pada akhir triwulan IV, namun karena waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seleksi mulai dari kerjasama pihak ketiga sampai dengan proses seleksi dibutuhkan waktu minimal 42 hari, sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan Rekrutmen karena waktu yang tersisa hanya akhir bulan desember
40. Kegiatan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan menengah realisasi \*fisik / output sebesar 35 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IV tidak terealisasi sesuai target capaian Rencana Aksi TW.IV dikarenakan setelah dilakukannya refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19.
41. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup realisasi \*fisik / output sebesar 45 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IV tidak terealisasi sesuai target capaian Rencana Aksi TW.IV dikarenakan setelah dilakukannya refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19.
42. Kegiatan Pelaksanaan Tim Pengendali Inflasi Daerah realisasi \*fisik / output sebesar 33 persen . Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 persen dikarenakan Belum ada realisasi Target Capaian Kinerja Rencana Aksi TW.IV dikarenakan

kegiatan tidak dapat dilanjutkan akibat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, penataan organisasi dan tatalaksana, keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. pelaksaaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, SKPD ini bukan merupakan OPD pelayanan publik sehingga tidak memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur Kinerja Sekretariat Daerah indikator yang dipergunakan mengacu pada hasil output program kegiatan. Disikapi lingkup Sekretariat daerah sebagai momentum menambah motivasi kerja sehinggavisidan misi kepala daerah dapat tercapai.

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat daerah sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dalam penyelenggranaan pemerintahan daerah, sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung maupun sistem kerja kondusif.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan

dilakukan pembenahan pelayanan dengan cara mengarahkan peningkatan program/kegiatan pada:

1. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, seperti melengkapi peralatan perkantoran, kendaraan dinas, pemanfaatan teknologi dan media massa;
2. peningkatan pemberian bimbingan teknis bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan, peningkatan disiplin kerja;
3. penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun penumpukan pekerjaan;
4. penyusunan SOP yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan citra pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan program, kegiatan, sub kegiatan hasil pemetaan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.
2. Adanya revisi Permendagri No 90 Tahun 2019 ke Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 terkait hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
3. Adanya pengurangan dan pengalihan anggaran kegiatan untuk penanganan covid 19.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya telah disesuaikan dengan Renstra Kabupaten Lampung Barat 2017 – 2022.



**3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat ada 3 (tiga) yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
3. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD tahun 2017-2022, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat misi yang terkait adalah :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
3. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Dengan tujuan yang akan dicapai :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
4. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan
5. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib

Dengan sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya kebijakan strategis di bidang Sumber Daya Alam dan bidang Perekonomian
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Program merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program adalah proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  - 1.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan
    - 1.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 1.2 Pengadaan Meubel
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 1.3 Pemeliharaan Meubel
    - 1.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
    - 1.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - 1.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - 1.3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - 1.4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9. Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
  - 1.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
  - 1.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
10. Penataan Organisasi dengan Sub Kegiatan
  - 10.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - 10.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - 10.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
  - 10.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - 10.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Fasilitasi Keprotokolan
  - 1.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  - 1.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

## **B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Penataan Administrasi Pemerintahan
  - 1.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
  - 1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
  - 1.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
  - 1.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
  - 1.2 Fasilitasi Bantuan Hukum
  - 1.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasikan dalam Website JDIH

## **C. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan Sub Kegiatan
  - 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
  - 1.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
  - 1.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kecil Usaha Rakyat (KUR)
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
  - 1.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
  - 1.2 Pengendalian dan Evaluasi dan Program Pembangunan
  - 1.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - 1.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - 1.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - 1.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam
  - 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
  - 1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
  - 1.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

---

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi para aparatur pelaksana. Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan OPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD.

Mengingat strategisnya peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi, advokasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahunan ini.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja selama tahun 2021 dengan berpedoman terhadap pelaksanaan tahun 2021 yang sedang berjalan, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi dalam 1(satu) tahun ke depan. Semoga Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

**Liwa,        Januari 2021**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Akmal Abd. Nasir, S.H**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19630405 199303 1 011**

**LAMPIRAN I**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RESTRA PERANGKAT PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2018 s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
4 01 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan								
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKA- SKPD yang disusun	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Perubahan RKA- SKPD yang disusun	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen penyusunan DPA- SKPD yang disusun	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Perubahan DPA- SKPD yang disusun	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%

4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
4	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
4	01	01	2.02	01	Penyediaan dan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	1254 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	627 orang	627 orang	50%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	4 laporan	80%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan prognosis realisasi anggaran	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	4 laporan	80%
4	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	2500 buah	1000 buah	500 buah	500 Buah	100%	500	2000 buah	80%
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung yang disewa	429 unit	15 unit	384 unit	8 unit	21%	15 unit	38 unit	9%
						Jumlah penginapan yang disewa	2050 unit	480 unit	610 unit	528 unit	87%	480 unit	1488 unit	73%
						Jumlah rumah yang disewa	549 unit	183 unit	0 unit	0 unit	0%	183 unit	366 unit	67%
						jumlah sewa kursi	94040 unit	39040 unit	18000 unit	14190 unit	79%	19000 unit	72230 unit	77%
						jumlah sewa sound system	308 unit	143 unit	50 unit	45 unit	90%	55 unit	243 unit	79%
						jumlah sewa tenda	2376 unit	726 unit	500 unit	336 unit	67%	550 unit	1612 unit	68%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran	33 tabung	12 tabung	7 tabung	0 tabung	0%	7 tabung	19 tabung	58%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah jenis cetakan	157 jenis	61 jenis	32 jenis	32 jenis	100%	32 jenis	125 jenis	80%



4	01	01	2.06	06	Pengandaan	jumlah jenis pengandaan	48 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	36 jenis	75%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah	25 media	10 media	5 media	5 media	100%	5 media	20 media	80%
						jumlah surat kabar harian umum (SKHU)	106 SKHU	40 SKHU	20 SKHU	20 SKHU	100%	23 SKHU	83 SKHU	78%
						jumlah surat kabar mingguan (SKM)	199 SKM	70 SKM	43 SKM	43 SKM	100%	43 SKM	156 SKM	78%
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah surat kabar nasional	17 media	6 media	3 media	3 media	100%	4 media	13 media	76%
						Jumlah makanan dan minuman tamu	176.000 kotak	70400 kotak	35200 kotak	17561 kotak	50%	35200 kotak	123161 kotak	70%
						jumlah sewa kamar penginapan	2.050 unit	480 unit	610 unit	528 unit	87%	480 unit	1488 unit	73%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi ke luar daerah	630 orang/paket	0 orang/paket	210 orang/paket	297 orang/paket	145%	210 orang/paket	507 orang/paket	80%
						jumlah rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	980 orang/paket	0 orang/paket	300 orang/paket	297 orang/paket	99%	300 orang/paket	600 orang/paket	61%
4	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil	36 unit	15 unit	7 unit	1 unit	14%	7 unit	23 unit	64%
						jumlah mobil yang disewa	99 unit	0 unit	33 unit	9 unit	27%	33 unit	42 unit	42%
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	jumlah motor	65 unit	26 unit	13 unit	0 unit	0%	13 unit	39 unit	60%
						Jumlah kursi kerja	757 unit	97 unit	220 unit	0 unit	0%	220 unit	317 unit	42%
						jumlah meja kerja	87 unit	33 unit	18 unit	0 unit	0%	18 unit	51 unit	59%
						kitchen set	4 set	1 set	1 set	0 set	0%	1 set	2 set	50%
					meja rapat	4 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%	1 unit	2 unit	50%	
4	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah	195 orang	78 orang	39 orang	39 orang	100%	39 orang	156 orang	80%
						jumlah paket/pengiriman	300 paket	0 paket	100 paket	0 paket	0%	100 paket	100 paket	33%
						jumlah perangko, materai dan benda pos	19.200 lembar	0 lembar	6400 lembar	6400 lembar	100%	6400 lembar	12800 lembar	67%

4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telepon	130 rekening	52 rekening	26 rekening	26 rekening	100%	26 rekening	104 rekening	80%
						jumlah rekening air	35 rekening	14 rekening	7 rekening	7 rekening	100%	7 rekening	28 rekening	80%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah rekening listrik	55 rekening	22 rekening	11 rekening	11 rekening	100%	11 rekening	44 rekening	80%
						Jumlah gedung yang disewa	429 unit	15 unit	384 unit	8 unit	21%	15 unit	38 unit	9%
						Jumlah penginapan yang disewa	2050 unit	480 unit	610 unit	528 unit	87%	480 unit	1488 unit	73%
						Jumlah rumah yang disewa	549 unit	183 unit	0 unit	0 unit	0%	183 unit	366 unit	67%
						jumlah sewa kursi	94040 unit	39040 unit	18000 unit	14190 unit	79%	19000 unit	72230 unit	77%
						jumlah sewa sound system	308 unit	143 unit	50 unit	45 unit	90%	55 unit	243 unit	79%
						jumlah sewa tenda	2376 unit	726 unit	500 unit	336 unit	67%	550 unit	1612 unit	68%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
4	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraannya	229 unit	150 unit	70 unit	70 unit	100%	2 unit	222 unit	97%
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraannya	383 unit	150 unit	75 unit	73 unit	97%	78 unit	301 unit	79%
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Meubel	Jumlah kursi kerja yang dipelihara	95 unit	38 unit	19 unit	0 unit	0%	19	57 unit	60%
						Jumlah kursi rapat yang dipelihara	20 unit	8 unit	4 unit	0 unit	0%	4 unit	12 unit	60%
						Jumlah meja kerja yang dipelihara	245 unit	98 unit	49 unit	0 unit	0%	49 unit	147 unit	60%

			Jumlah meja makan yang dipelihara	35 set	14 set	7 set	0 set	0%	7 set	21 set	60%
			Jumlah meja rapat yang dipelihara	450 unit	180 unit	90 unit	0 unit	0%	90 unit	270 unit	60%
4 01 01 2.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	190 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	90 unit	90 unit	47%
4 01 01 2.09 11		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	30 gedung	12 gedung	6 gedung	0 gedung	0%	6 gedung	18 gedung	60%
4 01 01 2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
4 01 01 2.11 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	10 orang	4 orang	2 orang	2 Orang	100%	2 orang	8 orang	80%
4 01 01 2.11 02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dan atribut kelengkapan KDH/WKDH yang disediakan	340 stel	136 stel	68 stel	68 Stel	100%	68 stel	272 stel	80%
4 01 01 2.11 03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang dibayarkan asuransi kesehatannya	50 orang	20 orang	10 orang	10 orang	100%	10 orang	40 orang	80%
			jumlah orang yang dibayarkan general check up	10 orang	4 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	8 orang	80%
4 01 01 2.11 04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH yang dibayarkan	10 orang	4 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	8 orang	80%
4 01 01 2.12		<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
4 01 01 2.12 01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
4 01 01 2.12 02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga WKDH	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%

4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah makanan dan minuman penyediaan kebutuhan rumah sekretariat daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
---	----	----	------	----	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	-----

4	01	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
---	----	----	------	--	----------------------------	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Cetak buku peraturan uraian tugas dan fungsi SKPD	200 buku	100 buku	0 buku	0 buku	0%	100 buku	200 buku	100%
---	----	----	------	----	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	----------	--------	--------	----	----------	----------	------

						jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	580 eksemplar	290 eksemplar	0 eksemplar	0 eksemplar	0%	290 eksemplar	580 eksemplar	100%
						jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 buku	0 buku	0%	1 dokumen	2 dokumen	100%
						jumlah dokumen monitoring dan evaluasi tupoksi perangkat daerah	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	2 dokumen	67%
						jumlah peserta	106 orang	53 orang	0 orang	0 orang	0%	53 orang	106 orang	100%
						jumlah peserta sosialisasi	159 orang	53 orang	53 orang	53 orang	100%	0 orang	106 orang	67%
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen ketatalaksanaan	600 eksemplar	240 eksemplar	120 eksemplar	0 eksemplar	0%	120 eksemplar	240 eksemplar	40%
						jumlah dokumen SOP	120 eksemplar	0 eksemplar	60 eksemplar	0 eksemplar	0%	60 eksemplar	60 eksemplar	50%
						jumlah dokumen survei kebijakan pelayanan publik	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	4 dokumen	80%
						jumlah perangkat daerah yang terbina ketatalaksanaan pelayanan publiknya	20 perangkat daerah	8 perangkat daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100%	4 perangkat daerah	16 perangkat daerah	80%

4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen reformasi birokrasi	240 eksemplar	60 eksemplar	60 eksemplar	40 eksemplar	67%	60 eksemplar	180 eksemplar	75%
---	----	----	------	----	---------------------------------------------	------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

			jumlah dokumen sosialisasi pengembangan budaya kerja	285 eksemplar	120 eksemplar	55 eksemplar	50 eksemplar	91%	55 eksemplar	230 eksemplar	81%
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap variabel dan indikator penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan ketatalaksanaan pelayanan publik	240 eksemplar	60 eksemplar	60 eksemplar	60 eksemplar	100%	60 eksemplar	240 eksemplar	100%
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		jumlah PD yang terbina	25 PD	10 PD	5 PD	0 PD	0%	5 PD	20 PD	80%
			Jumlah Dokumen laporan kinerja pemerintah daerah yang disusun	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	80%
			nilai/predikat SAKIP Kabupaten	BB predikat	B predikat	BB predikat	BB predikat	100%	BB predikat	BB predikat	100%
4 01 01 2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>								
4 01 01 2.14 01	fasilitasi keprotokolan		Jumlah Cetak dan penggandaan plakat	660 buah	0 buah	220 buah	220 buah	100%	220 buah	440 buah	67%
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		jumlah jenis pakaian kerja protokol	364 stel	0 stel	122 stel	122 stel	100%	120 stel	242 stel	66%
			Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	112 kali	0 kali	12 kali	40 kali	333%	50 kali	90 kali	80%
			jumlah perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah kabupaten lampung barat	300 kali	0 kali	100 kali	85 kali	85%	100 kali	185 kali	62%

			jumlah pertemuan dan dialog dengan masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	227 kali	0 kali	27 kali	27 kali	100%	100 kali	127 kali	56%
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah pelaksanaan dokumentasi pimpinan	260 kali	0 kali	60 kali	60 kali	100%	100 kali	160 kali	62%
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>										
4 01 02 2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>								
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah buku laporan bulanan	300 Eksemplar	120 eksemplar	60 eksemplar	30 eksemplar	50%	60 eksemplar	210 eksemplar	70%
			jumlah dokumen SPM	200 Eksemplar	50 eksemplar	50 eksemplar	50 eksemplar	100%	50 eksemplar	150 eksemplar	75%
			jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar di kabupaten lampung barat	60 Kegiatan	24 kegiatan	12 kegiatan	9 kegiatan	75%	12 kegiatan	45 kegiatan	75%
			jumlah pelaksanaan rakor bulanan	60 Kali	24 kali	12 kali	11 kali	92%	12 kali	47 kali	78%
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah berita acara kesepakatan batas wilayah	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	50%
			jumlah data pembakuan nama rupabumi unsur buatan kabupaten lampung barat,	75 Kecamatan	30 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	60 kecamatan	80%
			jumlah laporan penyelesaian status pekon sukapura	41 laporan	11 laporan	10 laporan	0 laporan	0%	10 laporan	22 laporan	54%
			jumlah pembinaan dana kelurahan	20 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 kelurahan	15 kelurahan	75%
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah		Jumlah buku LPPD	160 eksemplar	40 eksemplar	40 eksemplar	40 eksemplar	100%	40 eksemplar	120 eksemplar	75%
			jumlah suplemen LPPD	200 eksemplar	80 eksemplar	40 eksemplar	40 eksemplar	100%	40 eksemplar	160 eksemplar	80%
			jumlah pelaksanaan rakor APKASI	31 kali	13 kali	6 kali	1 kali	17%	6 kali	20 kali	65%

				jumlah pelaksanaan rakor unsur forkompimda di kabupaten lampung barat	30 kali	12 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	24 kali	80%		
4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen laporan kerjasama daerah	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual yang disediakan	95 kegiatan	38 kegiatan	19 kegiatan	18 kegiatan	95%	19 kegiatan	75 kegiatan	79%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga keagamaan penerima hibah yang termonitor dan terbina	275 lembaga	0 lembaga	85 lembaga	76 lembaga	89%	90 lembaga	166 lembaga	60%
						jumlah sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS/UKS)	120 Sekolah	30 sekolah	30 sekolah	0 sekolah	0%	30 sekolah	60 sekolah	50%
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rakor	6 Kali	0 kali	2 kali	1 kali	50%	2 kali	3 kali	50%
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah peraturan daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	50 perda	16 perda	10 perda	7 perda	70%	10 perda	23 perda	46%

			jumlah peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dilakukan harmonisasi dalam pembentukannya	1925 produk hukum	1114 produk hukum	385 produk hukum	522 produk hukum	135%	385 produk hukum	1636 produk hukum	85%
4 01 02	2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang dilakukan pendampingan bantuan hukum	10 kasus	4 kasus	1 kasus	0 kasus	0%	0 kasus	4 kasus	40%
			jumlah persentase data pendukung capaian rencana aksi nasional hak asasi manusia Kab/Kota oleh Pemda sesuai prosedur	100%	40%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4 01 02	2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasikan dalam Website JDIH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi kepada perangkat daerah	125 produk hukum	50 produk hukum	25 produk hukum	25 produk hukum	100%	25 produk hukum	75 produk hukum	60%
			jumlah produk hukum yang didokumentasikan dalam website JDIH	1580 produk hukum	1130 produk hukum	395 produk hukum	529 produk hukum	134%	395 produk hukum	1659 produk hukum	105%
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>										
4 01 03	2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian perekonomian dan pembangunan</b>								
4 01 03	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah buku laporan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	40 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0%	20 kali	20 kali	50%
			jumlah dewan pengawas BUMD yang terpilih	15 orang	0 orang	3 orang	0 orang%	0%	3 orang	3 orang	20%
4 01 03	2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah buku laporan TPAKD	60 kali	0 kali	20 kali	2 kali	10%	20 kali	22 kali	37%
			jumlah buku laporan TPID	40 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0%	20 buku	20	50%
			jumlah terpantaunya data harga komoditi Kab. Lampung Barat	15 kec	0 kec	0 kec	0%	0%	15 kec	15 kec	100%



4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kecil Usaha Rakyat (KUR)	Jumlah calon debitur peserta sosialisasi KUR	1500 orang	1000 orang	200 orang	0 orang	0%	100 orang	1100 orang	73%
						jumlah cetak buku data pelaku ekonomi Kab. Lampung Barat	200	80 buku	40 buku	2 buku	1%	40 buku	122 buku	61%
						jumlah kajian sosial ekonomi masyarakat penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4	01	03	2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian perekonomian dan pembangunan</b>								
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen penyusunan, pengumuman dan monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemkab Lampung Barat	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
						jumlah dokumen standar biaya Kab. Lampung Barat	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi dan Program Pembangunan	Jumlah laporan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tiap catur wulan (per 4 bulan) dan tahunan	20 laporan	8 laporan	4 laporan	4 Laporan	100%	4 laporan	16 laporan	80%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah cetak bahan rakor pop (OPD)	1060 eksemplar	424 eksemplar	212 eksemplar	212 eksemplar	100%	212 eksemplar	848 eksemplar	80%
						jumlah cetak bahan rakor pop (pimpinan rapat)	200 Eksemplar	80 eksemplar	40 eksemplar	40 eksemplar	100%	40 eksemplar	160 eksemplar	80%
						jumlah cetak laporan jaring laba-laba,	320 buku	128 buku	64 buku	64 buku	100%	64 buku	256 buku	80%
						jumlah cetak perbulan, laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kab. Lampung Barat,	640 buku	256 buku	128 buku	128 buku	100%	128 buku	512 buku	80%

				jumlah cetak per triwulan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kab. Lampung Barat	320 buku	128 buku	64 buku	64 buku	100%	64 buku	256 buku	80%		
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian perekonomian dan pembangunan</b>									
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang telah dievaluasi	1705 paket	620 paket	350 paket	155 paket	44%	375 paket	1150 paket	67%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah terlaksananya operasional dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik Kab. Lampung Barat	36 bulan	24 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang dikonsultasikan	50 paket	20 paket	10 paket	10 Paket	100%	10 paket	40 paket	80%
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>	<b>Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian perekonomian dan pembangunan</b>									
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen kerjasama LPP dan RKT	12 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	4 dokumen	5 dokumen	42%
					jumlah waktu koordinasi sosialisasi dalam rangka pemanfaatan pengembangan pengelolaan SDA kehutanan, pertanian dan perikanan		43%	0%	43%	40%	93%	43%	43%	93%

				meningkatnya pengembangan dan pengawasan pengelolaan SDA kehutanan, pertanian dan perikanan, terdatanya calon kemitraan konservasi	100%	0%	100%	93%	93%	100%	100%	93%				
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Jumlah sosialisasi pengelolaan SDA pertambangan dan lingkungan hidup	9 kali	0 kali	3 kali	1 kali	34%	3 kali	4 kali	45%
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Jumlah koordinasi pengelolaan SDA energi dan air	12 kali	0 kali	4 kali	4 Kali	100%	4 kali	8 kali	67%

**LAMPIRAN II**  
**RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		OPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>75.695.600</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>83.265.160</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 dokumen	7.509.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	8.260.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 dokumen	12.122.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	13.334.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 dokumen	9.760.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	10.736.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan DPA-SKPD yang disusun	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 dokumen	7.766.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	8.542.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 dokumen	5.907.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	6.497.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 dokumen	15.680.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	17.248.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 dokumen	16.951.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	18.646.210	
<b>2</b>	<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>40.790.659.670</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>44.869.725.637</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>

	Penyediaan dan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	228 Orang	40.746.277.770	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		228 Orang	44.820.905.547	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Laporan	14.029.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.431.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 dokumen	16.418.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	18.060.790	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan prognosis realisasi anggaran	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Laporan	13.934.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.327.400	
<b>3</b>	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>4.041.520.100</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>4.445.672.110</b>	<b>Bagian Umum</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	500 Buah	70.778.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		500 Buah	77.855.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung, penginapan, rumah, kursi, sound system, tenda yang disewa	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	15 Unit, 480 Unit, 183 Unit, 19000 Unit, 55 Unit, 550 Unit	683.306.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		15 Unit, 480 Unit, 183 Unit, 19000 Unit, 55 Unit, 550 Unit	751.636.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah isi ulang gas dan tabung pemadam kebakaran	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	194 Tabung, 7 Tabung	28.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		194 Tabung, 7 Tabung	31.680.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	32 Jenis, 12 Jenis	331.416.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		32 Jenis, 12 Jenis	364.557.710	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah, SKHU, SKM dan SKN	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	5 Media, 23 SKHU, 43 SKM, 4 Media	523.080.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Media, 23 SKHU, 43 SKM, 4 Media	575.388.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan jumlah sewa kamar penginapan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	19.000 kotak, 160 Unit	971.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		19.000 kotak, 160 Unit	1.068.320.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rakor luar daerah dan rakor dalam daerah	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	210 Orang/Paket, 330 Orang/Paket	1.432.940.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		210 Orang/Paket, 330 Orang/Paket	1.576.234.000	

<b>4</b>	<b>Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>910.062.580</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>1.001.068.838</b>	<b>Bagian Umum</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dan motor yang disewa	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	7 Unit, 33 Unit, 13 Unit	711.104.580	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7 Unit, 33 Unit, 13 Unit	782.215.038	
	Pengadaan Meubel	Jumlah kursi dan meja kerja, kitchen set dan meja rapat	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	220 Unit, 18 Unit, 1 Set, 1 Unit	198.958.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		220 Unit, 18 Unit, 1 Set, 1 Unit	218.853.800	
<b>5</b>	<b>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>2.043.300.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>2.247.630.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah, jumlah paket pengiriman, jumlah perangko, materai dan benda pos	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	39 Orang, 100 Paket, 6400 Lembar	22.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		39 Orang, 100 Paket, 6400 Lembar	24.475.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Telp, jumlah rekening air, jumlah rekening listrik	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	26 Rekening, 7 Rekening, 11 Rekening	981.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		26 Rekening, 7 Rekening, 11 Rekening	1.080.090.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung, penginapan, rumah, kursi, sound system, tenda yang disewa	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	15 Unit, 480 Unit, 183 Unit, 19000 Unit, 55 Unit, 550 Unit	437.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		15 Unit, 480 Unit, 183 Unit, 19000 Unit, 55 Unit, 550 Unit	481.250.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	12 Bulan	601.650.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	661.815.000	
<b>6</b>	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>2.343.266.650</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>2.577.593.315</b>	<b>Bagian Umum</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraannya	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	2 Unit	178.561.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Unit	196.417.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraannya	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	78 Unit	1.271.318.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		78 Unit	1.398.449.800	

	Pemeliharaan Meubel	Jumlah kursi kerja, kursi rapat, meja kerja, meja makan, meja rapat yang dipelihara	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	49 Unit, 90 Unit, 19 Unit, 7 Set, 4 Unit	24.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		49 Unit, 90 Unit, 19 Unit, 7 Set, 4 Unit	26.950.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	90 Unit	181.533.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		90 Unit	199.686.300	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	9 Gedung	687.354.650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9 Gedung	756.090.115	
<b>7</b>	<b>Program Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>773.690.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>851.059.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	2 Orang	160.351.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Orang	176.386.100	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dan atribut kelengkapan KDH/WKDH yang disediakan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	68 Stel	163.939.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		68 Stel	180.332.900	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang dibayarkan asuransi kesehatannya dan general check up	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	10 Orang, 2 Orang	49.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Orang, 2 Orang	54.340.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH yang dibayarkan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	2 Orang	400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Orang	440.000.000	
<b>8</b>	<b>Program Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>1.136.500.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>1.250.150.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	12 Bulan	549.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	604.725.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga WKDH	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	12 Bulan	433.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	477.290.000	

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah makanan dan minuman penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	5000 Kotak	152.850.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5000 Kotak	168.135.000	
<b>9</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>748.286.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>823.114.600</b>	<b>Bagian Organisasi</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Cetak buku peraturan uraian tugas dan fungsi SKPD, dokumen anjab dan analisis beban kerja, dokumen kelembagaan dan anjab yg disusun, jumlah dokumen monitoring dan evaluasi tupoksi perangkat daerah, jumlah peserta	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	100 Buku, 290 Eksemplar, 2 Dokumen, 1 Dokumen, 53 Orang, 53 Orang	129.553.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Buku, 290 Eksemplar, 2 Dokumen, 1 Dokumen, 53 Orang, 53 Orang	142.508.960	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen ketatalaksanaan, dokumen SOP, dokumen survei kebijakan pelayanan publik, jumlah perangkat daerah yang terbina ketatalaksanaan pelayanan publiknya	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	120 Eksemplar, 60 Eksemplar, 1 Dokumen, 4 PD	367.871.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		120 Eksemplar, 60 Eksemplar, 1 Dokumen, 4 PD	404.659.090	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen reformasi birokrasi, dokumen sosialisasi pengembangan budaya kerja	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Dokumen, 60 Eksemplar	88.184.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen, 60 Eksemplar	97.003.280	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap variabel dan indikator penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan ketatalaksanaan pelayanan publik jumlah PD yang terbina	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Dokumen, 5 PD	97.839.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen, 5 PD	107.623.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan kinerja pemerintah daerah yang disusun nilai/predikat SAKIP Kabupaten	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Dokumen, 70 Predikat	64.836.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen, 70 Predikat	71.319.820	
<b>10</b>	<b>Program Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>4.021.463.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Bidang Urusan</b>	<b>4.423.609.300</b>	<b>Bagian Protokol dan Kumnikasi Pimpinan</b>
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Cetak dan penggandaan plakat, jumlah jenis pakaian kerja protokol	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	220 Buah, 120 stel	762.680.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		220 Buah, 120 stel	838.948.000	



	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, jumlah perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah kabupaten lampung barat, jumlah pertemuan dan dialog dengan masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	50 Kali, 100 Kali, 100 Kali	2.925.118.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50 Kali, 100 Kali, 100 Kali	3.217.629.800	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah pelaksanaan dokumentasi pimpinan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	100 Kali	333.665.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Kali	367.031.500	
<b>11</b>	<b>Program Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>3 Bidang Urusan</b>	<b>1.099.085.100</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>3 Bidang Urusan</b>	<b>1.208.993.610</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah buku laporan bulanan, dokumen SPM, pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar di kabupaten lampung barat dan pelaksanaan rakor bulanan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	60 Eksemplar, 50 Eksemplar, 12 Kegiatan, 12 Kali	622.320.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		60 Eksemplar, 50 Eksemplar, 12 Kegiatan, 12 Kali	684.552.110	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah berita acara kesepakatan batas wilayah jumlah data pembakuan nama rupabumi unsur buatan kabupaten lampung barat, laporan penyelesaian status pekon sukapura dan jumlah pembinaan dana kelurahan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Dokumen, 15 Kecamatan, 10 Laporan, 5 Kelurahan	268.218.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen, 15 Kecamatan, 10 Laporan, 5 Kelurahan	295.039.800	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah buku LPPD , suplemen LPPD, jumlah pelaksanaan rakor APKASI, rakor unsur forkompimda di kabupaten lampung barat	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	40 Eksemplar, 40 Eksemplar, 6 Kali, 6 Kali	208.547.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		40 Eksemplar, 40 Eksemplar, 6 Kali, 6 Kali	229.401.700	
<b>12</b>	<b>Program Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>31.080.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>34.188.000</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen laporan kerjasama daerah	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Dokumen	31.080.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	34.188.000	
<b>13</b>	<b>Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>3 Bidang Urusan</b>	<b>13.658.189.200</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>3 Bidang Urusan</b>	<b>15.024.008.120</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>

	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual yang disediakan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	14 kegiatan	13.314.365.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		14 kegiatan	14.645.802.050	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga keagamaan penerima hibah yang termonitor dan terbina, jumlah sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS/UKS)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	90 Lembaga, 30 Sekolah	294.453.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		90 Lembaga, 30 Sekolah	323.898.850	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rakor	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	2 Kali	49.370.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Kali	54.307.220	
<b>14</b>	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>3 Bidang Urusan</b>	<b>680.782.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>3 Bidang Urusan</b>	<b>748.860.200</b>	<b>Bagian Hukum</b>
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah peraturan daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya, jumlah peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dilakukan harmonisasi dalam pembentukannya	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	10 Perda, 385 Produk Hukum	202.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Perda, 385 Produk Hukum	222.530.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang dilakukan pendampingan bantuan hukum, jumlah persentase data pendukung capaian rencana aksi nasional hak asasi manusia Kab/Kota oleh Pemda sesuai prosedur	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Kasus, 20%	332.358.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Kasus, 20%	365.593.800	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasikan dalam Website JDIH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi kepada perangkat daerah, jumlah produk hukum yang didokumentasikan dalam website JDIH	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	25 Produk Hukum, 395 Produk Hukum	146.124.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		25 Produk Hukum, 395 Produk Hukum	160.736.400	
<b>15</b>	<b>Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian perekonomian dan pembangunan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>973.372.700</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>100%</b>	<b>1.070.709.970</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah buku laporan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, jumlah dewan pengawas BUMD yang terpilih	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	20 Buku, 3 Orang	365.133.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Buku, 3 Orang	401.646.850	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah buku laporan TPAKD, jumlah buku laporan TPID, jumlah terpantaunya data harga komoditi Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	20 Buku, 20 Buku, 15 Kecamatan	290.198.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Buku, 20 Buku, 15 Kecamatan	319.217.800	

	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kecil Usaha Rakyat (KUR)	Jumlah calon debitur peserta sosialisasi KUR, jumlah cetak buku data pelaku ekonomi Kab. Lampung Barat, jumlah kajian sosial ekonomi masyarakat penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	100 Orang, 40 Buku, 1 Dokumen	318.041.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Orang, 40 Buku, 1 Dokumen	349.845.320	
<b>16</b>	<b>Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian perekonomian dan pembangunan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>669.281.800</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>100%</b>	<b>736.209.980</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen penyusunan, pengumuman dan monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemkab Lampung Barat, jumlah dokumen standar biaya Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	1 Dokumen, 1 Dokumen	126.174.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen, 1 Dokumen	138.791.400	
	Pengendalian dan Evaluasi dan Program Pembangunan	Jumlah laporan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tiap catur wulan (per 4 bulan) dan tahunan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	4 Laporan	110.209.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Laporan	121.229.900	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah cetak bahan rakor pop (OPD) , jumlah cetak bahan rakor pop (pimpinan rapat), jumlah cetak laporan jaring laba-laba, jumlah cetak perbulan, laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kab. Lampung Barat, jumlah cetak per triwulan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	212 Eks, 40 Eks, 64 Buku, 128 Buku, 64 Buku	432.898.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		212 Eks, 40 Eks, 64 Buku, 128 Buku, 64 Buku	476.188.680	
<b>17</b>	<b>Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian perekonomian dan pembangunan</b>	<b>Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>459.126.800</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>100%</b>	<b>505.039.480</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang telah dievaluasi	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	360 Paket	182.617.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		360 Paket	200.879.360	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah terlaksananya operasional dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	12 Bulan	122.648.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	134.913.790	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang dikonsultasikan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	10 Paket	153.860.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Paket	169.246.330	

18	Program Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian perekonomian dan pembangunan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	100%	481.867.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	530.054.580	Bagian Sumber Daya Alam
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen kerjasama LPP dan RKT, jumlah waktu koordinasi sosialisasi dalam rangka pemanfaatan pengembangan pengelolaan SDA kehutanan, pertanian dan perikanan serta meningkatnya pengembangan dan pengawasan pengelolaan SDA kehutanan, pertanian dan perikanan, terdatanya calon kemitraan konservasi	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	4 Dokumen, 43 persen, 100 persen	191.238.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Dokumen, 43 persen, 100 persen	210.362.460	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah sosialisasi pengelolaan SDA pertambangan dan lingkungan hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	3 Kali	150.777.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Kali	165.854.700	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi pengelolaan SDA energi dan air	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua kelurahan	4 Kali	139.852.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Kali	153.837.420	
<b>TOTAL PAGU :</b>					<b>74.937.229.000</b>				<b>82.430.951.900</b>	